



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG



Pertanian, Maju, Mandiri, Modern





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan menyusun Rencana Kerja Tahun 2026. Rencana Kerja tahun 2026 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2026.

Dalam urusan pilihan pertanian Rencana Kerja ini merupakan rencana kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Singaraja, 28 Pebruari 2025

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Buleleng

Gede Melandrat,SP
Pembina Tk I / IV.b
NIP. 197207121998031010



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG TAHUN LALU	11
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pertanian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng	11
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian	35
	2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian	43
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	46
	2.5 Penelaahan Usulan dan Program dan Kegiatan Masyarakat	47
BAB III	TUJUAN, SASARAN DINAS PERTANIAN	57
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	57



	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	58
	Dinas Pertanian	59
	3.3 Program dan Kegiatan		
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN	65
BAB V	PENUTUP	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Rencana Kerja 2026 Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, dan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat di sektor pertanian dan sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan OPD yang dicapai pada masa satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Dinas Pertanian dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah



dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Kepala OPD, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Pertanian dalam arti luas.

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian Buleleng dengan perannya yang multi fungsi. Secara proporsional sektor pertanian merupakan sektor paling dominan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Buleleng.

Mencermati kondisi dan potensi ekonomi Kabupaten Buleleng yang berbasis pertanian dan pariwisata serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan pedesaan, maka pembangunan pertanian dalam arti luas, industri kecil dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan perekonomian Bali menjadi domain agenda prioritas pembangunan ekonomi. Penjabaran kebijakan pembangunan ekonomi tersebut salah satunya adalah mensinergikan sektor pertanian, pariwisata dan perdagangan.

Perkembangan proses pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng sudah dilakukan melalui berbagai program untuk peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis serta peningkatan kesejahteraan petani, namun masih terkendala berbagai permasalahan dan kedepannya tantangan akan semakin berat mengingat keberadaan sumber daya alam dan perkembangan global. Permasalahan yang dominan dihadapi saat ini adalah rendahnya minat generasi muda untuk menjadi petani atau pelaku usaha dibidang pertanian dan tingginya alih fungsi lahan pertanian. Saat ini rata-rata umur petani di Kabupaten Buleleng adalah diatas 50 tahun.



Salah satu hal yang menyebabkan rendahnya minat generasi muda untuk menjadi petani atau pelaku usaha pertanian adalah persepsi bahwa usaha pertanian itu tidak menjanjikan keuntungan secara ekonomi. Dan Bali yang sangat ketergantungan dengan sektor pariwisata, menjanjikan pendapatan yang lebih dibandingkan dengan sektor pertanian. Inilah yang menyebabkan generasi muda saat ini lebih memilih menggeluti sektor pariwisata dibandingkan sektor pertanian. Hal ini menjadi tantangan untuk membuktikan bahwa berusaha tani atau menjadi pelaku usaha pertanian bisa menguntungkan secara ekonomi. Sehingga laju alih fungsi lahan bisa dikurangi dan generasi muda berminat untuk menjadi petani. Untuk itu dibutuhkan gagasan dan strategi mengelola potensi pertanian di Kabupaten Buleleng.

Upaya dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan pertanian diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, dokumen tersebut antara lain adalah Rencana Kerja. Rencana Kerja 2026 merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, BAPPEDA mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja SKPD dengan Kepala SKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA). Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang



diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja antar SKPD dan Kecamatan.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2026. Rencana Kerja ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1(satu) tahun sebagai pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2023 - 2026 serta sebagai evaluasi dari pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi dari SKPD. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2026 sekaligus sebagai pelaksanaan dari RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dari urusan pertanian.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2026;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.
13. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 No. 9)
14. Peraturan Bupati Buleleng No. 12. Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahu 2023 – 2026.



1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2026 dimaksudkan untuk memberikan arah, acuan dan sekaligus pedoman bagi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2026:

1. Sebagai acuan Dinas Pertanian dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
2. Terwujudnya pemahaman, kesatuan langkah, sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng dalam kurun tahun 2026 ;
3. Terwujudnya kepastian dan kejelasan pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng dalam kurun tahun 2026;
4. Tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng dalam kurun tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah 2026 dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.



1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pertanian Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.



2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Dinas Pertanian

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN

Berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian yang sudah disepakati.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tandatangan



kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

Rencana Kerja merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis sebagai dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan Rencana Kerja akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan pencapaian Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan pencapaian Rencana Strategis adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, dan realisasi Rencana Strategis Dinas Pertanian mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng serta realisasi APBD.

Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan pertanian maka program pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2024 terdiri dari 6 program, 17 kegiatan, dan 37 sub kegiatan. Sedangkan untuk membiaya kegiatan pada tahun anggaran 2024 pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng diperoleh dari alokasi Pagu anggaran belanja APBD Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 33.070.551.546,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.931.804.728,-. Atau realisasi keuangan sebesar 93,53 % dan realisasi fisik 97,60 % dari rencana. Anggaran dan realisasi biaya pelaksanaan per program adalah sebagai berikut :



1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - c) Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor
 - c) Penyediaan Bagan Logistik Kantor
 - d) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - e) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

- 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - b) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
- 2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - a) Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman



- b) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
- 3) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - a) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
- 3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
 - 1) Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
 - 2) Pembangunan Prasarana Pertanian
 - a) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - b) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - c) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- 4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
 - 1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1(satu)Daerah Kabupaten / KotaPengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah kab/kota
 - 2). Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota
 - a) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
 - b. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a) Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
- 5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
 - 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - b) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan



- c) Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- b) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- c) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- d) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Alokasi Anggaran : Rp. 23.299.548.993,-

Realisasi Anggaran : Rp. 22.542.343.594,- (96.75 %)

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 165.221.063,-

Realisasi Anggaran : Rp. 161.764.330,- (97.91 %)

Hasil : Persentase realisasi kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi anggaran 97.91 %.

a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 88.679.372,-

Realisasi Anggaran : Rp. 86.842.122,- (97,93 %)

Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, realisasi anggaran 97,93 %.

b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 76.541.691,-

Realisasi Anggaran : Rp. 74.922.208,- (97,88 %)

Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi anggaran 97,88%



2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 21.790.530.641,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 21.093.991.581,- (96,80%)
 Hasil : Persentase realisasi kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, realisasi anggaran 96,80%

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 21.600.566.100,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 20.904.167.163,- (96,78%)
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi anggaran 96,78 %

b) Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 21.860.724,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 21.860.724,- (100%)
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN , realisasi anggaran 100 %.

c) Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

Alokasi Anggaran : Rp. 168.103.817,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 167.963.694,- (99,92%)
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran, realisasi anggaran 99,92 %

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 54.579.749,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 54.579.701,- (99,999%)
 Hasil : Persentase realisasi kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, realisasi anggaran 99,999 %

a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 54.579.749,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 54.1579.701,- (99,999%)
 Hasil : Persentase realisasi kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, realisasi anggaran 99,999 %



4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 194.279.428,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 194.279.428,- (99,93 %)
 Hasil : Persentase realisasi kegiatan
 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, realisasi anggaran 99,93 %

a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Alokasi Anggaran : Rp. 194.272.428
 Realisasi Anggaran : Rp. 194.142.658,- (99,93%)
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan
 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, realisasi
 anggaran 99,93%

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 182.451.790,-,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 149.366.804,- (81,87%)
 Hasil : Persentase realisasi kegiatan
 Administrasi Umum Perangkat Daerah, realisasi anggaran 81,87%.

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 10.000.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 9.420.500,- (94,21%)
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan
 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, realisasi
 anggaran 94,21%.

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 69.255.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 43.362.850,- (62,61%)
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan
 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi anggaran
 62,61%.

c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 47.725.000
 Realisasi Anggaran : Rp. 45.362.500,- (95,05%)
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan
 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi anggaran
 95,05%

d) Fasilitasi Kunjungan Tamu

Alokasi Anggaran : Rp. 26.404.585



Realisasi Anggaran : Rp. 22.153.750,- (83,90%)
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan
 Fasilitasi Kunjungan Tamu, realisasi anggaran 83,90%.

e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 29.067.205,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 29.067.204,- (100%)
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan
 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, realisasi
 anggaran 100%.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 735.970.938,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 716.506.014,- (97,36%)
 Hasil : Persentase realisasi kegiatan
 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, realisasi
 anggaran 97,36%

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi Anggaran : Rp. 59.864.150,-,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 59.864.148,- 100%
 Hasil : realisasi sub kegiatan
 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi anggaran 100%

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi Anggaran : Rp. 210.920.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 206.124.007,- (97.73%)
 Hasil : realisasi sub kegiatan
 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi
 anggaran 97.73%

c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 254.118.195,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 242.345.583,- (95,37%)
 Hasil : realisasi sub kegiatan
 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi
 anggaran 95,37%

d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 211.068.593,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 208.172.276,- (98.63)%



Hasil : realisasi sub kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, realisasi anggaran 98,63%

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 176.522.384,-
Realisasi Anggaran : Rp. 171.992.506,- (97,43)%
Hasil : realisasi sub kegiatan
Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah , realisasi anggaran 97,43%

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Alokasi Anggaran : Rp. 176.522.384,-
Realisasi Anggaran : Rp. 171.992.506,- (97,43)%
Hasil : realisasi sub kegiatan
Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi anggaran 97,43%

2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Alokasi Anggaran : Rp. 3.082.345.033,-

Realisasi Anggaran : Rp. 2.512.811.130,- (81,52%)

1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Alokasi Anggaran : Rp. 631.403.323,-
Realisasi Anggaran : Rp. 618.466.866,- (97,95%)
Hasil : realisasi kegiatan Pengawasan
Penggunaan Sarana Pertanian , realisasi anggaran 97,95%

a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

Alokasi Anggaran : Rp. 230.347.143,-
Realisasi Anggaran : Rp. 218.038.514,- (94,66%)
Hasil : realisasi sub kegiatan Pengawasan
Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi , realisasi anggaran 94,66%

b) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Alokasi Anggaran : Rp. 401.056.180,-
Realisasi Anggaran : Rp. 400.428.352,- (99,84%)



Hasil : realisasi sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian , realisasi anggaran 99,84%

2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 514.171.844,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 499.719.739,- (97,19%)
 Hasil : realisasi kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota, realisasi anggaran 97,19%

a) Peningkatan SDG Hewan/Tanaman

Alokasi Anggaran : Rp. 256.907.216,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 247.834.354,- (96,47%)
 Hasil : realisasi sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, realisasi anggaran 96,47,%

b) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

Alokasi Anggaran : Rp. 257.264.628,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 251.885.385,- (97,91%)
 Hasil : realisasi sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, realisasi anggaran 97,91%

3) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 1.936.769.866,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 1.394.624.525,- (72.01%)
 Hasil : realisasi kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota, realisasi anggaran 72.01%

a) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

Alokasi Anggaran : Rp. 1.936.769.866,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 1.936.769.866,- (72.01%)
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil, realisasi anggaran 72.01%



3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Alokasi Anggaran : Rp. 2.942.027.088,-

Realisasi Anggaran : Rp. 2.796.681.529,- (95.06%)

1) Pengembangan Prasarana Pertanian

Alokasi Anggaran : Rp. 160.160.088,-

Realisasi Anggaran : Rp. 160.159.864,- (100%)

Hasil : realisasi kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, realisasi anggaran 100%

a) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B

Alokasi Anggaran : Rp. 35.172.228,-

Realisasi Anggaran : Rp. 35.172.004,- (99,999%)

Hasil : realisasi sub kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B, realisasi anggaran 99,999%

b) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya

Alokasi Anggaran : Rp. 124.987.860,-

Realisasi Anggaran : Rp. 124.987.860,- (100%)

Hasil : realisasi sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya, realisasi anggaran 100%

2) Pembangunan Prasarana Pertanian

Alokasi Anggaran : Rp. 2.781.867.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 2.636.521.665,- (94,78%)

Hasil : realisasi kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, realisasi anggaran 94,78%

a) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

Alokasi Anggaran : Rp. 240.000.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 240.000.000,- (100%)

Hasil : realisasi sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani ,realisasi anggaran 100%



b) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian

Alokasi Anggaran : Rp. -
 Realisasi Anggaran : Rp. -
 Hasil : realisasi sub kegiatan
 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian,
 realisasi anggaran -

c) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Alokasi Anggaran : Rp. 1.157.373.330,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 1.157.303.330,- (99,999%)
 Hasil : realisasi sub kegiatan
 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani,
 realisasi anggaran 99,999%

d) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Alokasi Anggaran : Rp.1.384.493.670 -
 Realisasi Anggaran : Rp.1.239.218.335 – (89,51%)
 Hasil : realisasi sub kegiatan
 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian
 Lainnya, realisasi anggaran(89,51%) -

4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Alokasi Anggaran : Rp. 2.004.649.846,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.428.716.576,- (71,27%)

1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 119.430.816,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 119.414.616,- (99,99%)
 Hasil : realisasi kegiatan Penjaminan Kesehatan
 Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan
 Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, realisasi anggaran 99,99%

a) Pemberantasan Penyakit Hewan menular dan Zoonosis dalam satu kabupaten/kota

Alokasi Anggaran : Rp. 119.430.816
 Realisasi Anggaran : Rp. 119.414.616,- (99,99%)



Hasil : realisasi sub kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan menular dan Zoonosis dalam satu kabupaten/kota, realisasi anggaran 99,99%

2) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 1.721.525.343
 Realisasi Anggaran : Rp. 1.146.572.096,- (66,60%)
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pengawasan atas Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, realisasi anggaran 66,60%

a) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Alokasi Anggaran : Rp. 1.721.525.343,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 1.146.572.096,- (66,60%)
 Hasil : realisasi sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, realisasi anggaran 66,60%

3) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Alokasi Anggaran : Rp. 136.693.687,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 162.729.864,- (99,41%)
 Hasil : realisasi kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, realisasi anggaran 99,41%

a) Pengawasan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

Alokasi Anggaran : Rp. 163.693.687,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 162.729.864,- (99,41%)
 Hasil : realisasi kegiatan Penerapan dan Pengawasan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan, realisasi anggaran 99,41%

5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Alokasi Anggaran : Rp. 192.426.780,-
Realisasi Anggaran : Rp. 190.562.780,- (99,03%)

1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 192.426.780,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 190.562.780,- (99,03%)



Hasil : realisasi kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, realisasi anggaran 99,03%

a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Alokasi Anggaran : Rp. 20.313.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 18.449.000,- (90.82%)
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, realisasi anggaran 90,82%

b) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Alokasi Anggaran : Rp. 50.960.328,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 50.960.328,- (100%)
 Hasil : realisasi sub kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, realisasi anggaran 100%

c) Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

Alokasi Anggaran : Rp. 121.153.452,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 121.153.452,- (100%)
 Hasil : realisasi sub kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis , realisasi anggaran 100%

6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Alokasi Anggaran : Rp. 1.549.553.806,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.549.553.806,- (99,78%)

1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Alokasi Anggaran : Rp. 1.549.553.806,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 1.460.683.119,- (94,27%)
 Hasil : realisasi kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian, realisasi anggaran 94,27%

a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Alokasi Anggaran : Rp. 862.549.650,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 853.302.017,- (98,92%)



Hasil : realisasi sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, realisasi anggaran 98,92%

b) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Alokasi Anggaran : Rp. 184.066.032,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 178.280.324,- (96,86%)
 Hasil : realisasi sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, realisasi anggaran 96,86%

c) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Alokasi Anggaran : Rp. 75.000.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 47.910.000,- (63,88%)
 Hasil : realisasi sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, realisasi anggaran 63,88%

d) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 427.893.124,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 318.196.778,- (89,09%)
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota, realisasi anggaran 89,09%

Secara rinci Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d tahun 2024 , Kabupaten Buleleng dalam bentuk tabel 2.1 berikut.

TABEL 2.1

EVALUASI KINERJA - CAPAIAN KEUANGAN DAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2024

KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT/ FISIK	
(1)	(2)			(4)		(5)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
3 27 01	1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah %	23.299.548.993	100,00	22.542.343.594	96,75	99,85
3 27 01 2.01		1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai perundangan	165.221.063	100	161.764.330	97,91	100,00
								100,00	
3 27 01 2.01 0001		1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.679.372	6,00	86.842.122	97,93	100,00
								100,00	
3 27 01 2.01 0007		1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.541.691	18,00	74.922.208	97,88	100,00
3 27 01 2.02		1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	21.790.530.641	100	21.093.991.581	96,80	100,00
2.09.01.2.02.0001		1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21.600.566.100	168	20.904.167.163	96,78	100,00
3 27 01 2.02 0003		1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	-Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.860.724	12	21.860.724	100,00	100,00
3 27 01 2.02 0008		1.2.3	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	-Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	168.103.817	48	167.963.694	99,92	100,00
3 27 01 2.03		1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan aset BMD	54.579.749	100	54.579.701	100,00	100,00
3 27 01 2.03 0006		1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	54.579.749	36	54.579.701	100,00	100,00
3 27 01 2.05		1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	194.272.428	100	194.142.658	99,93	100,00
3 27 01 2.05 0003		1.5.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	194.272.428	12	194.142.658	99,93	100,00
3 27 01 2.06		1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang kegiatan administrasi umum perangkat daerah	182.451.790	100	149.366.804	81,87	99,02
3 27 01 2.06 0001		1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.000.000	5	9.420.500	94,21	100,00
3 27 01 2.06 0002		1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	69.255.000	1	43.362.850	62,61	98,00

KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT/FISIK	
(1)	(2)			(4)		(5)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
3 27 01 2.06 0004		1.6.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47.725.000	12	45.362.500	95,05	99,58
3 27 01 2.06 0008		1.6.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.404.585	2	22.153.750	83,90	97,50
3 27 01 2.06 0009		1.6.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.067.205	50	29.067.204	100,00	100,00
3 27 01 2.08		1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas penunjang kegiatan Penunjang urusan pemerintah daerah	735.970.938	100	716.506.014	97,36	99,92
3 27 01 2.08 0001		1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	59.864.150	12	59.864.148	100,00	100,00
3 27 01 2.08 0002		1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	210.920.000	35	206.124.007	97,73	99,69
3 27 01 2.08 0003		1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	254.118.195	2	242.345.583	95,37	100,00
3 27 01 2.08 0004		1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	211.068.593	96	208.172.276	98,63	100,00
3 27 01 2.09		1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	176.522.384	100	171.992.506	97,43	100,00
								100,00	
3 27 01 2.09 0002		1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	176.522.384	50	171.992.506	97,43	100,00
3 27 02	2.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang menggunakan Sarana Pertanian yang Unggul %	3.082.345.033	100	2.512.811.130	81,52	94,06
3 27 02 2.01		2.1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	631.403.323	100	618.466.866	97,95	100,00
					230.347.143		218.038.514	94,66	100,00
3 27 02 2.01 01		2.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	230.347.143	35	218.038.514	94,66	100,00
								100,00	
3 27 02 2.01 02		2.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	401.056.180,00	1	400.428.352	99,84	100,00

KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT/FISIK	
(1)	(2)			(4)		(5)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
3 27 02 2.02	2.2.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	514.171.844	100	499.719.739	97,19	100,00	
							96,47	100,00	
3 27 02 2.02 02	2.2.1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	256.907.216,00	92	247.834.354	96,47	100,00	
							97,91	100,00	
3 27 02 2.02 03	2.2.2	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanam	257.264.628	38	251.885.385	97,91	100,00	
3 27 02 2.03	2.3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak	1.936.769.866	100	1.394.624.525	72,01	82,19	
3 27 02 2.03 01	2.3.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1.936.769.866	73	1.394.624.525	72,01	82,19	
3 27 03	3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang menggunakan Prsarana Pertanian yang Unggul %	2.942.027.088	100	2.796.681.529	95,06	100,00	
3 27 03 2.01	3.1.	Pengembangan Prasarana Pertanian	jumlah Penyediaan Prasarana Pertanian	160.160.088	100	160.159.864	100,00	100,00	
3 27 03 2.01 01	3.1.1.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	35.172.228	1	35.172.004,00	100,00	100,00	
3 27 03 2.01 03	3.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	124.987.860	1	124.987.860,00	100,00	100,00	
3 27 03 2.02	3.2	Pembangunan Prasarana Pertanian	jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	2.781.867.000	100	2.636.521.665	94,78	100,00	
3 27 03 2.02 03	3.2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	240.000.000	2	240.000.000,00	100,00	100,00	
3 27 03 2.02 09	3.2.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1.384.493.670	9	1.239.218.335,00	89,51	100,00	

KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
					ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT/FISIK	
(1)	(2)				(4)		(5)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
3 27 03 2.02 10		3.2.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1.157.373.330	9	1.157.303.330,00	99,99	100,00	
3 27 04	4.		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kelompok Tani / Ternak yang berbudidaya secara intensif %	2.004.649.846	100	1.428.716.576	71,27	91,67	
3 27 04 2.01		4.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian kesehatan hewan/penyakit hewan	119.430.816	100	119.414.616	99,99	100,00	
3 27 04 2.01 0008		4.1.1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1(satu)Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	119.430.816	2	119.414.616	99,99	100,00	
3 27 04 2.03		4,3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota	Persentase penurunan kasus penyakit ternak mencapai target	1.721.525.343	100	1.146.572.096	66,60	75,00	
3 27 04 2.03 02		4.3.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1.721.525.343	12	1.146.572.096	66,60	75,00	
3 27 04 2.04		4,4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kelompok tani / ternak yang berbudidaya secara intensif	163.693.687	100	162.729.864	99,41	100,00	
3 27 04 2.04 0010		4.4.1	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	163.693.687	5	162.729.864	99,41	100,00	
3 27 05	5.		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian %	192.426.780	100	190.562.780	99,03	100,00	
3 27 05 2.01		5.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	192.426.780	100	190.562.780	99,03	100,00	
									100,00	
3 27 05 2.01 0001		5.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	20.313.000	10	18.449.000	90,82	100,00	
3 27 05 2.01 0002		5.1.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	50.960.328	60	50.960.328	100,00	100,00	

KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT/FISIK	
(1)	(2)			(4)		(5)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
3 27 05 2.01 0004		5.1.3	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	121.153.452	9	121.153.452	100,00	100,00
3 27 07	7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan pengetahuan penyuluh dan petugas teknis %	1.549.553.806	100	1.460.689.119	94,27	100,00
3 27 07 2.01		7,1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan yang melakukan intensifikasi pengelolaan pertanian dan peternakan %	1.549.553.806	100	1.460.689.119	94,27	100,00
3.27.04.2.01.0001		7.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	862.594.650	1	853.302.017	98,92	100,00
3 27 07 2.01 0002		7.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	184.066.032	1	178.280.324	96,86	100,00
3 27 07 2.01 0003		7.1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	75.000.000	2	47.910.000	63,88	100,00
3 27 07 2.01 0005		7.1.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	427.893.124	3	381.196.778	89,09	100,00
JUMLAH TOTAL			JUMLAH TOTAL		33.070.551.546	100	30.931.804.728	93,53	97,60
						Sisa Anggaran	2.138.746.818	6,47	
PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :									
1. Belum optimalnya capaian PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN karena ada 5 kelompok pada Kegiatan Hibah uang tidak dapat dicairkan sebesar Rp. 565,000,000,- (1,71 %) karena terkendala administrasi. Selanjutnya Belum optimalnya capaian PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, karena kegiatan DAK Non Fisik, kendala : pada kegiatan Operasional pengobatan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) Tidak dapat dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tidak terdapat Penyakit Hewan Menular strategis (PHMS) keputusan Mentan No. 121/KPTS/PK.320/M/03/2023, 10 Maret 2023. ada silva sebesar Rp. 459.000.000 (1,39%)									
Upaya tindak lanjut atas permasalahan di atas yaitu :									
- Koordinasi ke BPKPD, Koordinasi Ke Inspektorat, KPPN Singaraja, ke Kelompok tani.									



Singaraja, 30 Desember 2024
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Buleleng,



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Kinerja pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 - 2026												
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-								KET
				Target 2023	CAPAIAN IKU 2023	%	Target tahun 2024	CAPAIAN IKU 2024	%	Target 2025	Target 2026	
1	Meningkatnya Produksi Pertanian yang Maju	Persentase peningkatan produksi pertanian (%)	48,18	59,01	132,18	224,00	66,30	238,84	360,24	73,07	79,53	IKU
2	Terwujudnya Produksi Pertanian yang Mandiri	Persentase kelembagaan petani dan pelaku usaha yang mandiri (%)	2,85	2,97	10,91	367,34	3,08	8,82	286,36	3,19	3,30	IKU
3	Terwujudnya Produksi dan Pemasaran Pertanian yang Modern	Persentase Produksi Pertanian dengan teknologi %	3,00	3,10	10,38	334,84	3,11	6,56	210,80	3,12	3,13	IKU
4	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Daerah (%)	3,1	3,3	3,3	100,00	3,3	3,3	100,00	3,3	3,3	Indikator Tambahan
5	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkaitan	Indek Kepuasan Masyarakat (Nilai)	85,00	85,00	85,00	100,00	85,00	85,70	100,82	85,00	85,00	Indikator Tambahan
6	Terwujudnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator Tambahan

Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 285,8 %, dikategorikan sangat baik. Pencapaian ini diantaranya disebabkan karena terjalinnya sinergi antara sumberdaya manusia baik petani maupun petugas sebagai pelaku utama di sektor pertanian dengan sumber daya alam yang dimiliki melalui pelaksanaan kegiatan yang sudah dirinci berdasarkan pada tingkat kebutuhan masyarakat yang didukung dari pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah.

Sasaran meningkatnya produksi pertanian yang maju dengan indikator kinerja berupa persentase peningkatan produksi pertanian (%) dengan target di tahun 2024 sebesar 66,30 % dan hasil pencapaian 238,84% dengan katagori Baik Sekali, hal tersebut di peroleh dari capaian indikator bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yaitu Jumlah benih ternak straw, jumlah petugas IB yang berkompeten, Jumlah penangkar benih berkompeten, Jumlah sumber benih berkualitas, jumlah pestisida nabati, jumlah vaksin hewan (Ekor), jumlah tempat pelayanan peternakan, jumlah alat dan mesin peternakan, jumlah jalan pertanian yang memadai dan jumlah alat mesin pasca panen.

Sasaran terwujudnya Produksi Pertanian yang mandiri dengan indikator kinerja berupa persentase kelembagaan petani dan pelaku usaha

yang mandiri (%) dengan target di tahun 2024 sebesar 3,08 % dan hasil pencapaian 8,82% dengan katagori Baik Sekali, hal tersebut di peroleh dari capaian indikator bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yaitu Jumlah SDA Pertanian berpotensi , Jumlah potensi wilayah, Jumlah penyuluh bersertifikat, jumlah penyuluh swadaya , jumlah petani/poktan dengan skor kemampuan kelas madya, jumlah pengelolaan pertanian dan peternakan sesuai aspek teknis, Jumlah sapi pertanian dan peternakan sesuai aspek teknis, Jumlah fasilitas pendukung smart farming, Jumlah poktan dengan biaya swadaya, jumlah poktan yang dibiayai Lembaga keuangan.

Sasaran terwujudnya Produksi dan Pemasaran Pertanian yang Modern dengan indikator kinerja berupa persentase Produksi Pertanian dengan Teknologi (%) dengan target di tahun 2024 sebesar 3,11 % dan hasil pencapaian 6,56 % dengan katagori Baik Sekali, hal tersebut di peroleh dari capaian indikator bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yaitu Jumlah jenis produk pertanian hasil inovasi, jumlah penerapan hasil riset di tingkat pengguna, jumlah hasil produksi Padi, Palawija, Hortikultura, Perkebunan, Produksi Daging, Populasi Sapi, Jumlah Produk pertanian yang dipasarkan secara online, Jumlah produk pertanian yang dipasarkan secara offline, jumlah pelaksanaan temu usaha, jumlah MOU pertanian yang ditindaklanjuti.

Terlampir Tabel capaian Indikator Kinerja Sasaran 2024 sebagaimana tersaji pada Tabel : 2.2 berikut :



Table 2.2

INDIKATOR KINERJA SASARAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 - 2026

N O	SASARA N	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-								PENANGGUNG JAWAB	
				Target 2023	Capaian n IKS 2023	%	2024	Capaian IKS 2024	%	2025	2026		
1	Meningkatnya Produksi Pertanian yang Maju	Jumlah benih ternak (straw) unggul (ekor)	16.000	17.000	13.000	76,47	18.000	14.134	78,52	19.000	20.000	Bidang Peternakan dan Keswan	
		Jumlah petugas IB yang berkompeten (orang)	20	25	25	100,00	30	33	110,00	35	38	Bidang Peternakan dan Keswan	
		Jumlah Penangkar Benih Berkompeten (Kelompok)	6	7	7	100,00	8	8	100,00	9	10	Bidang Hortikultura	
			7	8	8	100,00	9	9	100,00	10	11	Bidang Tanaman Pangan	
			2	3	3	100,00	4	4	100,00	5	6	Bidang Perkebunan	
		Jumlah Sumber Benih Berkualitas (Kelompok)	1	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	Bidang Tanaman Pangan	
			13	14	15	107,14	15	15	100,00	16	17	Bidang Hortikultura	
			1	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	Bidang Perkebunan	
		Jumlah pestisida nabati (Jenis)	-	1	1	100,00	2	2	100,00	2	2	Bidang Tanaman Pangan	



			1	3	3	100,00	3	3	100,00	3	4	Bidang Hortikultura
			-	1	1	100,00	1	1	100,00	2	2	Bidang Perkebunan
		Jumlah obat/vaksin peternakan (dosis)	1.500	2.000	2.000	100,00	2.500	70.334	2.813,36	2.750	3.000	Bidang Peternakan dan Keswan
		Jumlah tempat pelayanan peternakan (lokasi)	9	10	10	100,00	10	10	100,00	10	10	Bidang Peternakan dan Keswan
		Jumlah alat dan mesin peternakan(paket)	1	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	Bidang Peternakan dan Keswan
		Jumlah sumber air pertanian(paket)	3	4	8	200,00	5	23	460,00	6	7	Bidang PSP
		Jumlah jalan pertanian yang memadai (paket)	1	2	32	1.600,00	3	2	66,67	4	5	Bidang PSP
		Jumlah alat mesin prapanen (paket)	3	3	35	1.166,67	3	51	1.700,00	3	3	Bidang PSP
		Jumlah alat mesin pasca panen (paket)	1	2	1	50,00	3	3	100,00	3	3	Bidang Tanaman Pangan
			3	4	4	100,00	4	4	100,00	4	5	Bidang Hortikultura
			1	2	2	100,00	2	2	100,00	3	3	Bidang Perkebunan
2	Terwujudnya Produksi Pertanian	Jumlah SDA Pertanian berpotensi (kelompok)	5	6	6	100,00	7	7	100,00	8	9	Bidang Penyuluhan



	yang Mandiri	Jumlah Potensi wilayah (lokasi)	9	9	9	100,00	9	9	100,00	9	9	Bidang Penyuluhan
		Jumlah Penyuluh bersertifikat (orang)	47	48	93	193,75	49	85	173,47	50	51	Bidang Penyuluhan
		jumlah Penyuluh swadaya (orang/kelompok)	6	8	45	562,50	10	54	540,00	12	14	Bidang Penyuluhan
		Jumlah petani/Poktan/ga poktan dgn skor kemampuan Klas Madya (kelompok)	70	71	290	408,45	72	290	402,78	73	74	Bidang Penyuluhan
		Jumlah pengelolaan pertanian dan peternakan sesuai aspek teknis(unit)	9	9	9	100,00	9	9	100,00	9	9	Bidang Peternakan dan Keswan
		Jumlah sarpras pertanian dan peternakan (unit)	9	9	9	100,00	9	9	100,00	9	9	Bidang Peternakan dan Keswan
		Jumlah fasilitas pendukung smartfarming (Kelompok)	1	2	6	300,00	3	6	200,00	4	5	Bidang Penyuluhan
		Jumlah POKTAN dengan biaya swadaya (Kelompok)	5	6	160	2.666,67	7	9	128,57	8	9	Bidang Penyuluhan
		jumlah POKTAN yang dibiayai lembaga keuangan (kelompok)	9	18	57	316,67	27	75	277,78	36	45	Bidang PSP



								553				
3	Terwujudnya Produksi dan Pemasaran Pertanian yang Modern	jumlah jenis produk pertanian HASIL INOVASI (jenis)	0	1	1	100,00	2	2	100,00	3	4	Bidang Tanaman Pangan
			1	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	Bidang Hortikultura
			1	2	2	100,00	3	3	100,00	3	3	Bidang Perkebunan
			1	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	Bidang Peternakan dan Keswan
		Jumlah penerapan hasil riset di tingkat pengguna (kelompok)	0	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	Bidang Hortikultura
			0	1	1	100,00	1	2	200,00	1	1	Bidang Peternakan dan Keswan
			0	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	Bidang Perkebunan
			1	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	Bidangb penyuluhan
		Jumlah hasil produksi pertanian ;	308.289,50	317.846,47		-	317.877,30	328.500,27	103,34	317.908,13	317.938,96	jumlah Produksi
		Produksi padi (Ton)	106.660,50	109.966,98	116.436,83	105,88	109.977,64	111.563,28	101,44	109.988,31	109.998,97	Bidang Tanaman Pangan
		Produksi palawija (Ton)	37.033,00	38.181,02	36.523,99	95,66	38.184,73	43.682,92	114,40	38.188,43	38.192,13	Bidang Tanaman Pangan
		Produkai Hortikultura (Ton)	137.855,00	142.128,51	155.097,31	109,12	142.142,29	143.613,07	101,03	142.156,08	142.169,86	Bidang Hortikultura
		Produkai Perkebunan (Ton)	19.000,00	19.589,00	19.627,21	100,20	19.590,90	21.580,00	110,15	19.592,80	19.594,70	Bidang Perkebunan
		Produkai Daging (Ton)	7.741,00	7.980,97	10.597,00	132,78	7.981,75	8.061,00	100,99	7.982,52	7.983,29	Bidang Peternakan dan Keswan



	Populasi sapi (Ekor)	149.305	149.610	68.881	46,04	149.915	69.575	46,41	150.220	150.525	Bidang Peternakan dan Keswan
	Jumlah produk pertanian yang dipasarkan secara online (jenis)	2	3	3	100,00	3	3	100,00	3	3	Bidang Tanaman Pangan
		5	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	Bidang Perkebunan
		5	6	6	100,00	6	6	100,00	6	7	Bidang Hortikultura
		1	1	1	100,00	2	2	100,00	3	3	Bidang Peternakan dan Keswan
	Jumlah produk pertanian yang dipasarkan secara offline (jenis)	7	8	8	100,00	9	9	100,00	10	11	Bidang Tanaman Pangan
		6	7	7	100,00	8	8	100,00	9	10	Bidang Perkebunan
		44	45	46	102,22	46	47	102,17	47	48	Bidang Hortikultura
		3	4	4	100,00	5	5	100,00	6	7	Bidang Peternakan dan Keswan
	Jumlah pelaksanaan temu usaha pertanian (mitra usaha)	1	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	Bidang Tanaman Pangan
		1	1	1	100,00	2	2	100,00	2	3	Bidang Perkebunan
		2	2	2	100,00	2	2	100,00	3	3	Bidang Hortikultura
	Jumlah MoU Produk Pertanian yang ditindaklanjuti (mitra usaha)	1	1	1	100,00	2	2	100,00	2	3	Bidang Perkebunan
		3	4	4	100,00	5	5	100,00	6	7	Bidang Hortikultura
		1	1	0	-	1	1	100,00	1	1	Bidang Peternakan dan Keswan



4	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	Persentase capaian fisik dan keuangan (persen)	100	100	100	100,00	100	100	100	100	100	Sekretariat
---	---	--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Dari target Indikator Kinerja Utama diatas maka Adapun target 2026 :

Sasaran meningkatnya produksi pertanian yang maju dengan indikator kinerja berupa persentase peningkatan produksi pertanian (%) dengan target di tahun 2026 sebesar 79,53 % , indikator bidang atau IKS pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yaitu Jumlah benih ternak straw, jumlah petugas IB yang berkompeten, Jumlah penangkar benih berkompeten, Jumlah sumber benih berkualitas, jumlah pestisida nabati, jumlah vaksin hewan (Ekor), jumlah tempat pelayanan peternakan, jumlah alat dan mesin peternakan, jumlah jalan pertanian yang memadai dan jumlah alat mesin pasca panen.

Sasaran terwujudnya Produksi Pertanian yang mandiri dengan indikator kinerja berupa persentase kelembagaan petani dan pelaku usaha yang mandiri (%) dengan target di tahun 2026 sebesar 3,30 % indikator bidang atau IKS pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yaitu Jumlah SDA Pertanian berpotensi , Jumlah potensi wilayah, Jumlah penyuluh bersertifikat, jumlah penyuluh swadaya , jumlah petani/poktan dengan skor kemampuan kelas madya, jumlah pengelolaan pertanian dan peternakan sesuai aspek teknis, Jumlah sapi pertanian dan peternakan sesuai aspek teknis, Jumlah fasilitas pendukung smart farming, Jumlah poktan dengan biaya swadaya, jumlah poktan yang dibiayai Lembaga keuangan.

Sasaran terwujudnya Produksi dan Pemasaran Pertanian yang Modern dengan indikator kinerja berupa persentase Produksi Pertanian dengan Teknologi (%) dengan target di tahun 2026 sebesar 3,13 % indikator bidang atau IKS pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yaitu Jumlah jenis produk pertanian hasil inovasi, jumlah penerapan hasil riset di tingkat pengguna, jumlah hasil produksi Padi, Palawija, Hortikultura, Perkebunan, Produksi Daging, Populasi Sapi, Jumlah Produk pertanian yang dipasarkan secara online, Jumlah produk pertanian yang dipasarkan secara offline, jumlah pelaksanaan temu usaha, jumlah MOU pertanian yang ditindaklanjuti.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian

Pembangunan pertanian dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian seperti meningkatnya jumlah penduduk; tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar; pesatnya kemajuan teknologi dan informasi; makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi; perubahan iklim global; perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat; kecilnya status dan luas kepemilikan lahan; masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan; masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh; masih rawannya ketahanan pangan dan energi; masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian sehingga pembangunan pertanian ke depan menghadapi banyak tantangan.

Terkait perubahan perangkat daerah di lingkup pemerintahan Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng dimana Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng serta Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buleleng melebur menjadi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dengan Tipe A sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan kewenangan kehutanan tidak lagi ada di Kabupaten namun ke Provinsi. Dan perubahan terakhir diatur dalam peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 tahun 2023 tanggal 6 januari 2023 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.

Sinergitas dalam pelayanan dilaksanakan bersama-sama baik dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali maupun dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali diwujudkan dalam bersama-sama mewujudkan program SIMANTRI (Sistem Pertanian Terintegrasi). Sedangkan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali adalah



bersama-sama dalam penanggulangan Rabies. Untuk sinergitas dengan Kementerian Pertanian adalah adanya kegiatan APBN dengan usulan dari Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng melalui eproposol dan Krisna DAK.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan pertanian fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng antara lain :

- Kompetisi penggunaan lahan terutama pada lahan pertanian (alih fungsi) akan semakin meningkat, akibat pembangunan sektor non-pertanian;
- Masih lemahnya kemampuan manajerial, teknis dan penerapan teknologi tepat guna baik di tingkat aparatur maupun kelembagaan tani;
- Masih lemahnya kemampuan petani/kelompok tani dalam mengakses permodalan, jejaring pasar dan sistem kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar petani;
- Dampak negatif pemanasan bumi (*global warming*) menyebabkan terjadinya dinamika iklim;
- Belum adanya standar pelayanan untuk memfasilitasi kegiatan usaha di sektor pertanian dan peternakan;
- Alih teknologi pertanian masih rendah;
- Rendahnya kualitas produk pertanian dan peternakan;
- Lemahnya kelembagaan tani;
- Sistem koordinasi antar lembaga masih lemah;
- Peranan institusi dan lembaga pemasaran masih rendah;
- Masih adanya penyakit hewan menular strategis.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Dalam pelaksanaan urusan pertanian, permasalahan yang dihadapi adalah:

- Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan
- Lahan kritis dan cuaca yang tidak menentu merupakan salah satu faktor penghambat keberhasilan perkembangan tanaman;
- Gangguan penyakit dari hewan ke manusia seperti rabies dan flu burung;



- Masih ditemukannya penggunaan bahan kimia yang membahayakan kesehatan antara lain, chlorine, formalin, residu pestisida pada sayuran, beras, buah-buahan, daging, susu, dan telur
- Lemahnya posisi tawar dan akses permodalan untuk membiayai usahanya
- Masih rendahnya SDM petani sehingga kemampuan dalam mengelola usahanya kurang optimal
- Masih rendahnya SDM petani dalam mengakses dan menggunakan teknologi pertanian terkini

b. Peluang

Adapun peluang dalam menjawab tantangan tersebut adalah:

- Kebijakan yang diambil dalam rangka mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian, yaitu melalui pemilihan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki nilai ekonomi tinggi, dan mempunyai peluang pasar yang terbuka serta dapat dikembangkan pada lahan sempit, sehingga diharapkan keterbatasan lahan bukan menjadi kendala untuk usaha dibidang pertanian;
- Komitmen Pemerintah dalam pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan;
- Pendanaan APBD dan APBN yang semakin berorientasi terhadap kinerja;
- Kesadaran masyarakat dalam mencegah penyakit zoonosis tinggi.

Rumusan rekomendasi dan catatan strategis untuk ditidakklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026 yaitu:

1. Kondisi pertanian masih belum mantap, terutama karena produksi komoditas pertanian, pangan dan perkebunan terkendala penurunan luas lahan pertanian secara terus menerus.
2. Produk hasil pertanian, pangan dan perkebunan kurang berdaya saing dalam perdagangan bebas.
3. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian baik petugas maupun petani.
4. Masih rendahnya aksesibilitas petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha pertanian.

Selain itu terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Belum stabilnya tingkat peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produksi tanaman pangan dan hortikultura
 - Sumber Daya Manusia (SDM) petani yang belum sepenuhnya dapat mengadopsi teknologi pertanian
 - Anomali iklim yang tidak dapat diprediksi
 - Belum optimalnya penerapan teknologi budidaya yang ramah lingkungan
2. Tingginya penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam usaha tani Hal ini dapat diatasi dengan :
 - Pengembangan penggunaan pupuk organik dalam budidaya
 - Pengembangan penggunaan pestisida organik
 - Rintisan budidaya pertanian organik

Kesadaran petani akan pentingnya penggunaan pestisida organik perlu ditingkatkan, karena residu pestisida organik akan berdampak pada kesehatan manusia dan juga lingkungan disekitarnya. Selain itu budidaya pertanian organik ini juga ditunjang oleh populasi hama dan penyakit tanaman yang juga dipengaruhi oleh iklim dan musim sebagai contoh musim penghujan dengan curah hujan intensitas yang tinggi akan berdampak pada munculnya hama dan penyakit tanaman.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pembangunan Pertanian Kabupaten Buleleng sebagaimana Rancangan awal RPD disebutkan bahwa prioritas pembangunan tahun 2026 merupakan rangkaian tahapan pencapaian Visi Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

Berkaitan dengan kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam mengatasi isu strategis yang ada, diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembangunan, baik itu dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengawasan maupun proses evaluasi pembangunannya.

Namun disisi lain Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sebagai perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian. Dari uraian tersebut, tugas Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng pada tahun 2026 sangat kompleks dan membutuhkan sumberdaya manusia yang profesional disamping sumber



anggaran yang tersedia. Dilihat dari kemampuan keuangan daerah pada tahun 2026 rencana anggaran yang dialokasi untuk Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sebesar Rp.32.950.000.000,-.

Dilihat dari rancangan akhir RPD sebesar Rp. 32.950.000.000,- maka seluruh kebutuhan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng diadopsi dalam rancangan akhir RPD ini.

Dengan anggaran tersebut maka pendekatan efektifitas dan ketepatan program/kegiatan yang disusun pada tahun 2026 harus benar dilaksanakan. Dari tabel analisa kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran dan pencapaian yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 sudah sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian apabila terjadi perubahan dinamika perekonomian makro daerah yang berdampak terhadap peningkatan laju inflasi maka akan dilakukan perubahan terhadap target dan pencapaian yang telah ditetapkan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 ditunjukkan oleh Tabel 2.4

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat berasal dari proposal yang disampaikan secara langsung, maupaun dalam usulan yang berasal dari Musrenbang. Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Pemangku Kepentingan (stakeholders) kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas dari kelurahan untuk mengatasi permasalahan di wilayah kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah. Selain itu masih ada kegiatan Musrenbang Kabupaten dan Forum SKPD untuk menampung usulan-usulan dari stakeholder terkait.

Seluruh bentuk Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Buleleng Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ditunjukkan oleh Tabel 2.2.

TABEL 2.2
USULAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026 KABUPATEN BULELENG

No	Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Volume	Pagu	KET
KECAMATAN TEJAKULA							
1	Prioritas 3	Bantuan Bibit Tanaman (Jeruk Keprok) luas lahan 20 Ha	Kelompok Tirta Jaya	Banjar Dinas Ngis Desa Tembok,	5000 Pohon	50.000.000	diakomodir sesuai kondisi anggaran
2	Prioritas 1	Pembangunan Jalan Usaha Tani (Komoditas Jeruk Keprok)	Kelompok Cempaka Sari	Banjar Dinas Kanginan, Desa Penuktukan,	500 meter	100.000.000	Masih menentukan nama kelompok dan jumlah yang diperlukan (Mekanisme Hibah Uang)/ UU no.17 tahun 2019 tentang Sumberdaya air
3	Prioritas 3	Bantuan Bibit Ternak (kambing FE)	Kelompok Tani Ternak Belong Sari	Banjar Dinas Sangambu, Desa Madenan,	10 ekor	50.000.000	Usulan diarahkan Mekanisme Hibah uang, Belum ada kelompok, belum ada proposal, dari desa akan segera melengkapi kelompok dan diinput di SIPD RI sebelum 31 maret 2025
4	Prioritas 2	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian (pengelolaan hasil kakao)	Kelompoktani Hotan	banjar Dinas Kanginan Desa Sembiran	43 orang	15.000.000	diakomodir
KECAMATAN SUKASADA							
1	Prioritas 2	Bantuan Sarana Prasarana Pertanian - Pengadaan Mesin Perontok Padi (Power Thresher)	Subak lapang Bedangin	Desa Panji	1	15.000.000	Masih menentukan jumlah yang diperlukan (Mekanisme Hibah Uang)
2	Prioritas 1	Pembangunan / Perbaikan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi : P x L , 2 juta /m2	Subak Tembau Lingkungan Lumbanan	Kelurahan Sukasada		100.000.000	Masih menentukan jumlah yang diperlukan (Mekanisme Hibah Uang)
3	Prioritas 1	Bantuan Bibit tanaman (Apel)	Subak Abian Tri Karya	Desa Gitgit	500	30.000.000	Satu-satunya usulan desa gitgit
4	Prioritas 2	Bantuan Bibit Ternak Sapi	Subak Babakan Pegadungan	Desa Pegadungan			Masih menentukan jumlah yang diperlukan (Mekanisme Hibah)
KECAMATAN BULELENG							
1	Prioritas 1	Bantuan Bibit Ternak (Babi dan Sapi)	Kelompok Wanita Tani Kamboja	Banjar Dinas Poh Desa Pohbergong	20 ekor	40.000.000	Usulan diarahkan Mekanisme Hibah uang, Belum ada kelompok, belum ada proposal, dari desa akan segera melengkapi kelompok dan diinput di SIPD RI sebelum 31 maret 2025
KECAMATAN SAWAN							

No	Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Volume	Pagu	KET
1	prioritas 2	Pembangunan / Perbaikan Jalan Usaha tani	Subak Lebaha Dauh Munduk	Desa Bungkulan	750m2	300.565.800	Usulan diarahkan Mekanisme Hibah uang , belum ada proposal, dari desa akan segera input di SIPD RI sebelum 31 maret 2025
2	prioritas 1	Pembangunan / Perbaikan Jalan Usaha tani	Subak Babakan	Desa Jagaraga, Banjar Dinas Kauh Teben	2km	810.000.000	Mekanisme Hibah uang
3	prioritas 3	Rehab Jaringan Irigasi Tersier	Subak Babakan	Desa Menyali, Banjar Dinas Layahan Kawan	600m	300.000.000	Mekanisme Hibah uang, catatan : 1 unit JIT Rp.75,000,000
4	prioritas 2	Pembangunan Perbaikan jalan usaha tani	Subak Babakan Tua	Desa Sawan, banjar dinas kanginan dan banjar dinas brahmana	2km	750.000.000	Mekanisme Hibah uang
5	prioritas 2	Pembangunan / Perbaikan Jaringan Irigasi Tersier	Subak Sekumpul	Desa Sekumpul	500m	800.000.000	Mekanisme Hibah uang
6	prioritas 3	Bantuan bibit ternak sapi	Kelompok wanasari mekar	Desa Galungan, Banjar dinas Dajanan Pangkung	10 ekor	120.000.000	Mekanisme Hibah uang
7	prioritas 3	Pembangunan / Perbaikan Jalan Usaha tani	Subak Babakan Lemukih	Desa Lemukih, banjar dinas Nangka	500m	300.000.000	Mekanisme Hibah uang
8	prioritas 3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	- Subak Babakan Suwug - Subak Semara - Subak Uma Sari	Desa Suwug - Banjar dinas Kelodan - Banjar dinas Sabi - banjar dinas Lebah	? M	1.050.000.000	Mekanisme Hibah uang
9	prioritas 1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	- Subak Kloncing - Subak Babakan - Subak Lanyah	Desa Kerobokan - Banjar dinas bale agung - Banjar dinas Dalem - Banjar dinas Kloncing	1.200 m	600.000.000	Mekanisme Hibah uang
10	prioritas 2	Pengadaan bibit ternak babi, ternak sapi,	3 Kelompok	Desa Kerobokan Banjar Dinas Kloncing	?	250.000.000	Mekanisme Hibah uang
11	prioritas 3	Pembangunan jalan usaha tani	Subak Desa	Desa Kerobokan	500m	500.000.000	Mekanisme Hibah uang
KECAMATAN BANJAR							
1	prioritas 1	Pembangunan / perbaikan jalan usaha tani	KTT Mekar Sari	Desa Pedawe, banjar dinas lambo	panjang 1810 Meter Lebar 3,5 Meter	118.000.000	Mekanisme Hibah Uang
2	prioritas 2	Bantuan Sarana Prasarana Pengolahan Gula Aren	KWT Tunjung Sari Mekar	Desa Cempaga	1 Paket	100.000.000	Mekanisme Hibah Uang
3	prioritas	Bantuan Bibit Tanaman Durian	Kelompok Gopala Nandini	Desa Banjar, Banjar dinas Perampas	100 bibit	100.000.000	Usulan di akomodir sesuai kondisi anggaran/ disarankan pengembangan durian lokal

No	Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Volume	Pagu	KET
4	prioritas	Bantuan Bibit Ternak (Sapi)	Gapoktan Amerta Nadi	Desa Tigawasa, banjar dinas uma sendi	50 ekor sapi betina	400.000.000	Mekanisme Hibah Uang
5	prioritas	Bantuan sarana Traktor	Subak Dencarik	Desa Dencarik	6 Unit	120.000.000	Mekanisme Hibah Uang
6	prioritas	Bantuan Bibit Ternak (Babi)	-	Desa Temukus	40 ekor	80.000.000	Mekanisme Hibah Uang (belum ada kelompok)
7	prioritas	Bantuan Bibit Ternak (Babi)	-	Banjar Tegehe	30 ekor	60.000.000	Mekanisme Hibah Uang (belum ada kelompok)
8	prioritas	Bantuan Bibit Durian	Subak Amertha Sari	Desa Munduk	2000 pohon	200.000.000	Usulan di akomodir sesuai kondisi anggaran
KECAMATAN BUSUNGBIU							
1	Prioritas 3	Bantuan Bibit Tanaman (Kelapa Genjah)	Poktan Panti Bhuana Sari	Desa Busungbiu	2.000 pohon	50.000.000	Usulan di akomodir sesuai kondisi anggaran
2	Prioritas 3	Pembangunan / Perbaikan Jaringan Irigasi Tersier	-	Desa Kekeran	-	-	hasil verifikasi ke desa bahwa usulan perbaikan jaringan irigasi tersier di kekeran tersebut yang benar adalah untuk perbaikan pintu air saluran irigasi primer di subak ringdikit dan semestinya usulan disampaikan ke dinas PUPR
3	Prioritas 2	Pembangunan / Perbaikan Jaringan Irigasi Tersier	Subak Sri Utami Giri	Desa Pelapuan	1.300 meter	400.000.000	Mekanisme Hibah uang, catatan : 1 unit JIT Rp.75,000,000
4	Prioritas 3	Bantuan Bibit Ternak/ kambing PE (Peranakan Etawa)	KTT Bina Arta	Desa Bengkel	15 ekor	30.000.000	Mekanisme Hibah Uang
5	Prioritas 3	Bantuan Peralatan / Mesin Pertanian/Rice transplanter	Subak Umajero	Desa Umajero	-	80.000.000	Mekanisme Hibah Uang
6	Prioritas 3	Bantuan mesin pencacah pakan ternak	KTT BINA JAYA	Desa Kedis	1 Unit	15.000.000	Mekanisme Hibah Uang
7	Prioritas 3	Pembangunan / Perbaikan Jaringan Irigasi Tersier	Subak Abian	Desa Kedis	1.100 meter	150.000.000	Mekanisme Hibah uang, catatan : 1 unit JIT Rp.75,000,000
8	Prioritas 2	Bantuan Bibit Tanaman (Manggis/Durian)	Subak Udiana Sari	Desa Telaga	500 pohon	125.000.000	Usulan di akomodir sesuai kondisi anggaran
9	Prioritas 3	Bantuan Obat Pengendali Hama Tanaman	Subak Abian Pura Penghulu	Desa Bongancina	550 ton	660.000.000	Pupuk Organik komoditas perkebunan/ usulan permohonan berbeda dengan kebutuhan
10	Prioritas 3	Pembangunan Jalan Usaha Tani	SA Gunung Renga	Banjar Mengenu Desa Dapdap Putih	1.000 x 3 meter	200.000.000	Jalan yang diusulkan menuju kebun kopi

No	Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Volume	Pagu	KET
11	Prioritas 3	Bantuan Bibit Tanaman (kopi stekres)	Kelompok Tani Buana Amerta Sari	Desa Sepang Kelod	-	25.000.000	diakomodir sesuai kondisi anggaran /dana APBN
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN							
1	Prioritas 3	Bantuan Peralatan/Mesin Pertanian/ sumur bor	Kelompok Tani Ternak Lembu Sari Desa Tambakan	Desa Tambakan Kec. Kubutambahan,	1 Paket	250.000.000	mohon Sumur Bor dengan catatan ada sumber air, dan maksimal 60 m (irigasi air tanah dangkal)- Rp. 140,000,000 mekanisme Hibah uang
2	Prioritas 3	Bantuan Bibit Tanaman (Bibit Durian Bawor)	Gapoktan	Banjar Dinas Kanginan, Desa Bila	-	-	Kelompok tani belum ada, sedang mencari kelompok
KECAMATAN GEROKGAK							
1	Prioritas 2	Bantuan Bibit Ternak (Sapi)	Kelompok Tani Kembang Sari	Tukadsumaga		200.000.000	Mekanisme Hibah Uang
2	Prioritas 3	Pengadaan Bibit Tanaman Durian	Masyarakat Desa Musi	Desa Musi		75.000.000	Belum ada kelompok
3	Prioritas 3	Pengadaan Bibit Sapi	Klp. Ternak Merta Sari	Desa Patas		250.000.000	Mekanisme Hibah Uang
4	Prioritas 3	Mesin Perontok Padi/Power Thresher	Subak Gerokgak	Desa Gerokgak	4 unit	200.000.000	Mekanisme Hibah Uang
5	Prioritas 3	Pengadaan Bibit Sapi	Klp.Ternak Bina Lestari	Desa Pemuteran		450.000.000	Mekanisme Hibah Uang
6	Prioritas 2	Jalan Usaha Tani	Klp Mitra Bina Usaha	Desa Sumberklompok	2500 m	100.000.000	Mekanisme Hibah Uang
7	Prioritas 3	Jalan Usaha Tani	Subak Yeh Salak	Desa Sumberkima		100.000.000	Mekanisme Hibah Uang
KECAMATAN SERIRIT							
1	Prioritas 2	Mesin Pertanian (Power Sprayer)	Subak Abian Tumpang Sari	Desa Bestala	10 Unit	40.000.000	Mekanisme Hibah Uang
2	Prioritas 2	Sarana dan prasarana pertanian/ Traktor	Subak Tegal Tua, Subak Tegal Anyar	Banjar Dinas Tegal wangi Desa Bubunan	2 unit	30.000.000	Mekanisme Hibah Uang
3	Prioritas 2	Unit Pengolahan Pupuk organik	kelompok Ternak Desa Ularan	banjar dinas yadnya kerti Desa Ularan	1 paket	200.000.000	Hibah uang/ diusulkan dana APBN
4	Prioritas 2	bibit Kelapa genjah	subak Abian Kerta Bumi	Banjar dinas kundalini Desa Umaayar			diusulkan dana APBN
5	Prioritas 2	benih padi	subak Ponjok Cukli	Banjar dinas kundalini Desa Umaayar			diusulkan dana APBN
6	Prioritas 2	bibit durian, mangga . Alpoukat	subak Abian taman Sari	Desa Rangdu	1500 pohon	50.000.000	
7	Prioritas 2	Jalan Usaha Tani	Subak Rangdu	Desa Rangdu	500 m	374.658.500	Mekanisme Hibah Uang
8	Prioritas 2	Pengadaan Bibit Sapi	KTT Santal Mekar Lestari, dan KTT Santal Lestari	Desa Mayong	20 ekor	120.000.000	Mekanisme Hibah Uang
9	Prioritas 2	bibit Kelapa genjah	Kelompok Karya Sari Utama	Banjar Dinas Celagi Desa Unggahan	1000 pohon	50.000.000	
10	Prioritas 2	Bibit Babi	KWT Babi Mekar Sari	Banjar Dinas Lebah Sari			Mekanisme Hibah Uang

No	Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Volume	Pagu	KET
11	Prioritas 2	Bibit Durian Musangking	-	Desa Gunung Sari	2000 pohon	240.000.000	Belum ada kelompok
12	Prioritas 2	Traktor	Gapoktan Tri Loka Amerta	Banjar Dinas Carik Agung Desa Lokpaksa	5 unit	150.000.000	Mekanisme Hibah Uang
13	Prioritas 2	Bibit Babi	10 Kelompok	desa Pangkung paruk	200 ekor	200.000.000	Mekanisme Hibah Uang
14	Prioritas 2	Jalan Usaha Tani / pengaman jalan/Guad rail di pinggir jalan tukad anyar	-	Banjar dinas kelodan Desa Kalianget			Kewenangan dinas PU dan Perhubungan
15	Prioritas 2	Handsprayer	5 subak	Desa Ringdikit	5 unit		Mekanisme Hibah Uang
16	Prioritas 2	Peralatan mesin pertanian (Rice Transplanter)	Subak Kalisada, Subak Tegallengga	Desa Kalisada	4 unit	250.000.000	Mekanisme Hibah Uang
17	Prioritas 2	Jalan usaha tani	Subak Benyah, Subak Abian Pala Amerta	banjar dinas sari desa munduk bestala	2800 m	300.000.000	Mekanisme Hibah Uang
				Jumlah		12.723.224.300	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada RPJMN 2025-2029, yang dituangkan dalam Perpres No.12 Tahun 2025 Selanjutnya, pembangunan nasional ke depan akan berpedoman pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari **visi, misi, dan program** pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan disusun berdasarkan **RPJP Nasional 2025-2045**. RPJM Nasional memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Hal ini akan menjadi panduan strategis dalam mencapai target pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

ASTA CITA menjadi agenda prioritas Kabinet Kerja dengan mengarahkan pembangunan pertanian kedepan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal:

- 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3.Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;



5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita, juga terdapat Peningkatan Agro industri sebagai bagian dari agenda 6 yaitu Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Kedaulatan pangan dan Agro industri menjadi bagian dalam upaya mewujudkan perekonomian yang lebih mandiri. Dari kedua sub agenda kedaulatan pangan dan peningkatan agro industri, maka Kementerian Pertanian hadir dengan visi "Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani". Tercapainya visi tersebut dapat dilihat dari sejauh mana sasaran strategis yang ditetapkan lima tahun kedepan, yang meliputi 1) meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula; 2) terjaminnya distribusi pangan; 3) meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi; 4) meningkatnya konsumsi pangan lokal; 5) stabilnya produksi cabai dan bawang merah; 6) berkembangnya produk bernilai tambah dan berdaya saing; 7) tersedianya bahan baku bio industry dan bio energi; 8) meningkatnya kualitas sumber daya insane petani; 9) meningkatnya pendapatan keluarga petani; 10) meningkatnya kualitas aparatur dan layanan kelembagaan pertanian; serta 11) meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian.

Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun empat kebijakan yaitu (1) melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian, (2) melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan, (3) membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional, serta (4) Memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian.



Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sebagai pelaksana urusan pilihan pemerintahan daerah di bidang Pertanian di Kabupaten Buleleng merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan pertanian agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan kebijakan nasional. Ada beberapa faktor kekuatan dan penghambat yang sangat mempengaruhi kinerja dalam mensinergikan kebijakan perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng dengan kebijakan nasional antara lain:

- Dukungan dan komitmen dari stakeholder pembangunan baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi serta dunia usaha
- Dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah
- Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Kabupaten Buleleng dari masing-masing komponen pembangunan

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

- Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan
- Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku “jalan pintas” (shortcutting)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2026 tidak lepas dari pencapaian rancangan awal Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Adapun tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng adalah “Peningkatan produksi mutu, daya saing dan pemasaran komoditas pertanian” Untuk tujuan tersebut diatas, maka sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng adalah :

1. Meningkatnya Produksi Pertanian yang Maju
Indikator : Persentase peningkatan produksi pertanian (%)
2. Terwujudnya Produksi Pertanian yang Mandiri
Indikator : Persentase kelembagaan petani dan pelaku usaha yang mandiri (%)
3. Terwujudnya Produksi dan Pemasaran Pertanian yang Modern
Indikator : Persentase produksi pertanian dengan teknologi(%)



Sedangkan sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan berupa RENJA sebagai bahan acuan bagi stakeholder pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng
- Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng
- Terkoordinasinya perencanaan prasarana infrastruktur pembangunan pertanian wilayah Kabupaten Buleleng
- Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng
- Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan secara periodik
- Terciptanya koordinasi internal antar bidang yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja
- Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam menjabarkan kebijakan operasional yang telah ditetapkan serta untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang akan ditempuh, maka Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng mencanangkan 6 program dan 18 kegiatan dan 49 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - (2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
 - (4) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - (2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



- (3) Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- (4) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - (1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - (1) Pelaporan pengelolaan retribusi daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - (1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - (2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - (4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - (5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - (6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (1) Pengadaan Mebel
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - (2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - (1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi



- (2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - (1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - (2) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
 - c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - (1) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
- a. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - (1) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
 - (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - (1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
 - (2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - (3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
 - (4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - (1) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - (1) Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
 - (2) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner



c. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

- (1) Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan
- (2) Pengawasan unit usaha Hewan dan Produk Hewan

5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

- (1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- (2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- (3) Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
- (4) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- (1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- (2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- (3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- (4) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2026 maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2026 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain:

- Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
- Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2026 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian.
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebanyak 6 program yang terdiri dari 18 kegiatan dan 49 sub kegiatan. Dengan rincian 5 program, 9 kegiatan, dan 24 sub kegiatan adalah urusan pilihan pertanian dan 1 program, 9 kegiatan, 25 sub kegiatan adalah penunjang/rutin sekretariat;
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2026 secara total sebesar Rp. 32.950.000.000,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Buleleng.



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Buleleng Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ditunjukkan oleh Tabel 4.1. Dan proyeksi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Strategis tahun 2023 – 2026 dapat dilihat berdasarkan table 4.1. :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026 Perkiraan maju 2027
Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

Tujuan	Sasaran	KODE PROGRAM/KEG/ SUB.KEG	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2026	Perkiraan maju Pagu 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PAGU DINAS PERTANIAN				32.950.000.000	36.245.000.000
Terwujudnya Produksi Pertanian yang berdaya saing	Meningkatnya tatakelola administrasi perkantoran	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah %	100	%	19.850.000.000	21.835.000.000
		3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai Perundangan	10	Dokumen	194.239.645,77	213.663.610
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	'Jumlah dokumen pelaporan keuangan	3	Dokumen	17.753.088.154	19.528.396.969
		3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	'Jumlah dokumen laporan pengelolaan aset BMD	36	Laporan	71.071.000	78.178.100
		3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	Dokumen	10.153.000	11.168.300
		3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	'Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	375.661.000	413.227.100
		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	'Jumlah fasilitas penunjang kegiatan administrasi umum perangkat daerah	52	Laporan	443.686.100	488.054.710
		3 27 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	'Jumlah fasilitas penunjang kegiatan Penunjang Pengadaan BMD	1	unit	-	-
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	'Jumlah fasilitas penunjang kegiatan Penunjang urusan pemerintah daerah	30	Laporan	791.934.000	871.127.400
		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	'Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	22	Unit	210.167.100	231.183.810
	Meningkatnya Produksi Pertanian yang Maju	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang menggunakan Sarana Pertanian yang Unggul %	100	%	5.500.000.000	6.050.000.000
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	23	Laporan	1.478.000.000	1.625.800.000

Tujuan	Sasaran	KODE PROGRAM/KEG/ SUB.KEG	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2026	Perkiraan maju Pagu 2027
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	2	Dokumen	2.046.000.000	2.250.600.000
		3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/bibit ternak tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/kota	Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan ternak	12	Laporan	1.976.000.000	2.173.600.000
	Meningkatnya Produksi Pertanian yang Maju	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang menggunakan Prsarana Pertanian yang Unggul %	100	%	4.000.000.000	4.400.000.000
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	jumlah laporan Penyediaan Prasarana Pertanian	13	Laporan	610.000.000	671.000.000
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	4	Unit	3.390.000.000	3.729.000.000
	Terwujudnya Produksi Pertanian yang Modern	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kelompok Tani / Ternak yang berbudidaya secara intensif %	100	%	1.000.000.000	1.100.000.000
		3.27.04.2.01	Penjaminan kesehatan hewan,penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengendalian kesehatan hewan/penyakit hewan	12	Laporan	615.000.000	676.500.000
		3.27.04.2.03	Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota	Persentase penurunan kasus penyakit ternak mencapai target	100	%	-	-

Tujuan	Sasaran	KODE PROGRAM/KEG/ SUB.KEG	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2026	Perkiraan maju Pagu 2027
		3.27.04.2.04	Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat	14	Laporan	385.000.000	423.500.000
	Terwujudnya Produksi Pertanian yang Modern	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian %	100	%	650.000.000	715.000.000
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100	Ha	650.000.000	715.000.000
	Terwujudnya Produksi Pertanian yang mandiri	3.27.06	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan pengetahuan penyuluh dan petugas teknis %	100	%	1.950.000.000	2.145.000.000
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan yang melakukan intensifikasi pengelolaan pertanian dan	100	%	1.950.000.000	2.145.000.000
			TOTAL				32.950.000.000	36.245.000.000
		JUMLAH PROGRAM	6 PROGRAM					
		JUMLAH KEGIATAN	18 KEGIATAN					
		JUMLAH SUB KEGIATAN	49 SUB KEGIATAN					



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2026 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2026. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2026 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Buleleng Tahun 2026.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh staf Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Buleleng. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Singaraja, 28 Pebruari 2025

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Buleleng

Gede Melandrat,SP
Pembina Tk I / IV.b
NIP. 197207121998031010